

.....

STRATEGI GELAR KEKUATAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MENGATASI PELANGGARAN DI WILAYAH ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN PERAIRAN DALAM RANGKA Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Oleh

**Lukman Kharish¹⁾, Ikhwan Syahtaria²⁾, Dohar Sianturi³⁾, Lukman Yudho Prakoso⁴⁾,
 Herlina Juni Risma Saragih⁵⁾, Ernalem Bangun⁶⁾**
 1,2,3,4,5,6Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan
 Email: [1lukmankharish@gmail.com](mailto:lukmankharish@gmail.com)

Abstract

Security in the territorial waters of a country is one of the important elements in maintaining the sovereignty of a country which based on facts on the ground shows that the ALKI II region poses a threat to international shipping where the threats are in the form of smuggling of goods, human trafficking, as well as terrorism and the impact of Malaysia's expansionary politics. is the impact of the non-optimal security in the ALKI II area due to the non-optimal degree of TNI al strength and regulations that are still overlapping in overcoming violations in the ALKI II area, so this study aims to find out how the interoperability between TNI dimensions in the ALKI II area in supporting the sovereignty of the Republic of Indonesia. And how are the efforts in strengthening the strategy of the pattern of operations and deployment of TNI AL forces in the ALKI II region. Then this study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods supported by literature studies as a method of data and fact tracking, where based on the results of the study it is known that interoperability between dimensions The TNI in the ALKI II area has not been well integrated and is still running independently and the pattern of operations and deployment of the TNI's combat force is not optimal yet with a centralized and regional nature so that optimization is needed. realizing the stability and security of Indonesian marine waters.

Keywords: TNI AL strength degree, ALKI II, Security Stability, OMSP

PENDAHULUAN

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan salah satu pola operasi yang dilaksanakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas- tugas nontempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana serta untuk kepentingan nasional, termasuk dalam rangka pengamanan pelayaran dan penerbangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikorelasikan dengan wilayah NKRI, NKRI merupakan negara yang memiliki

wilayah kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dan terdapat 92 pulau terluar, dimana 67 pulau terluar ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil perbatasan. (Dishidrosal, 2017) Dimana mengacu pada luasnya wilayah tersebut, Indonesia termasuk dari 117 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut di Montego-Boy Jamaica pada tahun 1982 dan kemudian dirumuskan dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *united nations convention on the law of the sea* (UNCLOS 1982) yang menjadi dasar dalam pembentukan Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

diantara ALKI I, II, dan III, ALKI II merupakan wilayah yang memiliki potensi

besar terjadi pelanggaran yang menyebabkan ikut campur negrara lain, mengingingat wilayah ALKI II adalah alur laut yang paling cepat dan aman untuk pelayaran. Karena ALKI II melintasi sisi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Hal ini terjadi karena pendangkalan yang di Selat Malaka yang membuat kapal-kapal pelayaran dunia lebih memilih jalur ALKI II.

Untuk ALKI II, jika melihat dari adanya suatu potensi ancaman/bahaya untuk saat ini masih berasal dari imbas konflik Blok Ambalat. Hal ini disebabkan adanya suatu kekhawatiran adanya usaha dari pihak negara tetangga atau negara lain untuk memanfaatkan wilayah ALKI II guna kepentingan militer angkatan perang, apalagi dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia.

Disisi lain adanya sumber daya alam yang melimpah di perairan ALKI II seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara ilegal turut menambah tingkat kerawanan pelanggaran hukum. Kemudian Jika dilihat dibagian selatan dari wilayah ALKI II, dimana tumbuh pesatnya perekonomian dibidang pariwisata (Bali) tentunya juga menimbulkan efek negatif kemungkinan adanya suatu penyeludupan barang, perdagangan manusia, serta terorisme dan imbas politik ekspansional Malaysia (Soedewo, 2015)

Selain itu Dalam hubungannya dengan aksi terorisme di Poso, perairan di perbatasan Indonesia dan Filipina Selatan termasuk wilayah yang rawan dari mengalirnya para pelaku terorisme global, secara perorangan dan berkelompok. Itulah sebabnya, Kodam VII Wirabuana telah bekerja sama dengan pihak militer Filipina untuk memperketat pengawasan jalur masuk mereka melalui pulau-pulau kecil atau pulau-pulau terluar di perbatasan kedua negara (Hermawan, 2020)

Kerjasama antara aparat keamanan RI-Filipina itu meliputi kegiatan patroli bersama secara rutin dan pengawasan di imigrasi, terutama untuk memantau imigran gelap dan

orang yang dicurigai. Selain terhadap masuknya secara ilegal para pelaku atau kelompok teroris, (Bakamla, 2018) kekhawatiran aparat keamanan Indonesia juga meningkat terhadap masuknya senjata dan amunisi yang dipasok dari kelompok ekstrim di Filipina Selatan ke Poso, Sulawesi, yang memanfaatkan jalur laut yang menjadi bagian dari ALKI II.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, Selama ini telah ditemukan jenis senjata dan bahan peledak yang digunakan oleh kelompok radikal yang berasal dari pelaku separatisme di Filipina Selatan. Selain ancaman yang berasal dari Filipina ancaman yang datang dari aktor negara berasal dari negeri jiran, seperti diperlihatkan Malaysia, yang berani dan seringkali melakukan pelanggaran terang-terangan ke wilayah udara Indonesia di atas ALKI II (Yashuananda, 2018)

Salah satunya yang terjadi Pada bulan Januari 2015, Malaysia telah melanggar wilayah kedaulatan Indonesia di Nunukan, dekat dengan ALKI II, sebanyak 2 kali di Tahun 2020, Pelanggaran wilayah di sekitar ALKI II, jika dibiarkan, akan meningkatkan ancaman bagi Pulau Sebatik dan Ambalat. kemudian ditinjau dari Ancaman yang datang terhadap wilayah sekitar ALKI II dari kegiatan *illegal fishing*, Hasil investigasi Tim Satgas Anti-Illegal Fishing Ditjen PSDKP KKP pada tahun 2019 mengungkapkan, 913 kapal telah ditangkap karena telah melakukan berbagai pelanggaran.

Demikian halnya, dengan intervensi asing yang dapat muncul akibat perkembangan yang sangat dinamis di kawasan, termasuk di perairan ALKI II, terlebih dengan fakta bahwa Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas alutsista yang dimiliki membuat tingkat ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah di sekitar ALKI II menjadi tinggi. Sementara, upaya mengatasinya melalui latihan dan operasi kerjasama di lapangan bukannya tidak membawa resiko. Karena, mengundang keterlibatan asing dalam latihan bersama yang

berpotensi untuk masuk jauh ke wilayah perairan Kepulauan Indonesia dan secara tidak langsung memberikan kesempatan pihak asing untuk melakukan pengintaian dan pendataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi rumusan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk Interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II dalam mendukung kedaulatan NKRI? Dan Bagaimana upaya dalam penguatan strategi Pola operasi dan penggelaran kekuatan TNI AL di wilayah ALKI II?

Referensi dan teori yang peneliti gunakan dalam menjawab dan menganalisa rumusan masalah menggunakan konsep dan teori Strategi, sebagaimana menurut Hart (2001) yang menyatakan bahwa strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Strategi juga merupakan suatu seni untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengintegrasikannya dengan lingkungan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut akan menyediakan pedoman bagi negara dalam memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus meminimalisir ancaman.

Strategi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan pedoman langkah di dalam perkembangan situasi yang tidak menentu. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi namun lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses sehingga mampu merumuskan langkah antisipasi. Yarger (2006) menambahkan jika strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends*, *ways*, dan *means* dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya untuk mempertajam analisis, teori pendukung yang digunakan adalah dengan menggunakan *Teori Naval Diplomacy*,

dimana Menurut Booth (2014) yang menyebutkan bahwa *naval diplomacy* dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara dalam pemilihan opsi penawaran kerja sama. Diplomasi jenis ini bahkan dapat digunakan dengan memperlihatkan kekuatan tersebut sebagai unsur pendukung, atau kekuatan yang mewakili tugas tertentu yang diberikan negara terhadap angkatan laut tersebut (Booth 2014). Menurut Booth (2014) Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan “Trinitas peran angkatan laut” yang terdiri dari Peran Militer (*military*), Peran Polisi (*Constabulary*) dan Peran Diplomasi (*Diplomacy*).

Menurut Booth (2014), *Naval diplomacy* pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap prestige yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kelayakan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* penting dilakukan mengingat dampak dari *naval diplomacy* dapat memberikan makna yang berbeda-beda

Dan sebagai pendukung teori yang sudah di uraikan sebelumnya, sebagai teori pendukung penulis menggunakan Teori keamanan maritim, Sebagaimana Menurut McNicholas (2008), keamanan maritim adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian, dan gangguan lainnya dimana Mayoritas ancaman yang terjadi dalam ruang lingkup keamanan maritim merupakan ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, separatisme, radikalisme yang berujung pada konflik komunal dengan laut sebagai medianya, kerusuhan sosial antarpengguna laut, perompakan dan pembajakan di laut, imigran ilegal,

penangkapan dan pembalakan ilegal, serta penyelundupan dan pencemaran laut.

Kemudian menurut Siebels (2020) yang menyebutkan bahwa Keamanan maritim adalah istilah umum yang diinformasikan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam domain maritime yang sering dikaitkan dengan keamanan Nasional, lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia. Ini termasuk lautan dunia tetapi juga laut regional, perairan teritorial, sungai dan pelabuhan. Istilah keamanan maritim bervariasi dan sementara tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional baru yang ada, dan tantangan regional terhadap domain maritim.

Selain itu, teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Teori Perencanaan Kekuatan dan Kemampuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Bartlett (1990) yang menyebutkan bahwa perencanaan kekuatan dan kemampuan militer, telah menentukan empat kemampuan tempur, terdiri atas. Kesiapan (*State of readiness*), meliputi kesiapan personel, latihan, perlengkapan dan pemeliharaan, diperlukan untuk menjaga persiapan kekuatan kita untuk dikerahkan. Logistik (*Logistic*), meliputi pemeliharaan komponen daftar amunisi, suku cadang, bahan bakar dan barang-barang lain yang dapat memberikan kemampuan kekuatan kita untuk memperpanjang pertempuran. Modernisasi (*State of modernisation*), meliputi perlengkapan kekuatan kita dengan kemampuan yang lebih dengan meningkatkan fasilitas dan teknik persenjataan; dan Struktur kekuatan (*Force structure*), meliputi jumlah dan susunan dari pesawat udara, batalyon pasukan dan kapal – kapal angkutan pasukan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (Moleong, 2012)

Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2015)

Dari latar belakang penelitian penulis berasumsi bahwa penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode dalam pelaksanaan penelitian hal ini dikarenakan Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Miles, 1992) andasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II dalam mendukung kedaulatan NKRI.

Menurut Bartlett (1990) dalam teori Perencanaan Kekuatan disampaikan bahwa perencanaan kekuatan dan kemampuan militer, telah menentukan empat kemampuan tempur, terdiri atas. Kesiapan (*State of readiness*), meliputi kesiapan personel, latihan,

perlengkapan dan pemeliharaan, diperlukan untuk menjaga persiapan kekuatan kita untuk dikerahkan. *Sustainability* (kesinambungan) meliputi pemeliharaan kemampuan khususnya dalam pelatihan bagi unsur-unsur pertahanan dan ketahanan. Modernisasi (*State of modernisation*), meliputi perlengkapan kekuatan kita dengan kemampuan yang lebih dengan meningkatkan fasilitas dan teknik persenjataan; dan dan Struktur kekuatan (*Force structure*), meliputi jumlah dan susunan dari pesawat udara, batalyon pasukan dan kapal – kapal angkutan pasukan.

Mengacu pada teori tersebut, maka dikorelasikan dengan bentuk Interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II dalam mendukung kedaulatan NKRI, dalam menyusun gelar kekuatan dibutuhkan pendekatan-pendekatan sebagai unit analisa yaitu aspek *Readiness* (kesiapan), *Sustainability* (kesinambungan), *Modernization* (modernisasi) dan *Structure* (struktur) Yang dikorelasikan dengan fakta di lapangan, maka kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut

Pertama aspek *Readiness* (kesiapan). Kondisi dan kemampuan TNI. yang diharapkan adalah sebagai berikut yaitu Kesiapan Prajurit yang terintegrasi. Dimana perwujudannya adalah kesiapan prajurit dari masing-masing matra yang sudah terintergrasi (sudah memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pengamanan) dimana hal tersebut merupakan implementasi dari sudah dilaksankanya latihan secara rutin dari masing-masing matra, Peningkatan kemampuan Prajurit meliputi kualitas intelektual, mental, kemampuan dan keterampilan agar mampu mencermati setiap perkembangan lingkungan strategis dan perubahan perkembangan sosial yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun peningkatan sumber daya untuk memiliki kemampuan secara optimal maka perlu dilaksanakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tersebut, penataan sistem pembinaan

karier untuk memberikan pengalaman penugasan secara bertingkat dan berlanjut serta pembenahan sistem pembinaan penyelenggaraan latihan yang terarah dalam rangka meningkatkan daya kritis, responsif dan antisipatif guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan prajurit di lapangan.

Kesiapan Gelar Kekuatan yang terintegrasi. Gelar kekuatan tersebut yaitu gelar kekuatan yang tidak bersifat sektoral dimana masing-masing matra sudah mengalokasikan kekuatannya untuk diintegrasikan dalam sebuah kesatuan operasi, dimana TNI AL sebagai *leading sector* diharapkan dapat membangun kekuatan yang memadai. Minimal dari yang ada saat ini berupa Lanal Tipe B dapat ditingkatkan menjadi sebuah Lantamal yang dilengkapi dengan satuan-satuan kapal yang mampu memberikan efek gentar terhadap musuh seperti gelar Kapal Frigate, Kapal Selam dan kapal-kapal patroli cepat yang dilengkapi persenjataan modern. Oleh sebab itu, diharapkan pembangunan dermaga kapal selam dan dermaga kapal atas air harus segera diwujudkan. Disamping itu kemampuan satuan Marinir juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan keberadaannya. Dari yang saat ini berupa Batalyon Marinir, kedepan diharapkan dapat dibangun kekuatan Marinir setingkat Brigade Marinir yang dilengkapi dengan berbagai dukungan di dalam pelaksanaan tugasnya.

Kemudian dalam aspek Kondisi *Sustainability* (kesinambungan) yang diharapkan dalam mendukung gelar kekuatan TNI terintegrasi di wilayah ALKI II adalah sebagai berikut: yaitu Melaksanakan latihan Rutin bersama dengan unsur-unsur terkait. Untuk menjadikan prajurit yang profesional terlatih dan berkemampuan optimal maka perlu diadakan suatu latihan yang berkesinambungan bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan siklus latihan TNI dimulai dari latihan perorangan, latihan satuan, latihan antar satuan dalam satu matra sampai dengan latihan gabungan antar Angkatan yang dilaksanakan

rutin dan Peningkatan anggaran latihan dan operasional. Anggaran yang diharapkan dalam rangka mengoptimalisasikan tugas secara berkesinambungan sehingga dapat optimal bukan saja dilaksanakan tidak hanya ketika negara sedang mengalami ancaman tetapi ketika negara dalam tahap persiapan guna menghadapi operasi militer agar tercipta penganggaran yang terintegrasi pada sektor pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah ALKI II .

Kemudian pada aspek *Modernization* (modernisasi) untuk mengatasi unit KRI yang dimiliki saat ini beberapa masih menggunakan teknologi lama diantaranya sistem penginderaan dan persenjataan yang memerlukan *Upgrade* dimana Hal signifikan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan pendeteksian bawah air baik yang dimiliki oleh KRI maupun kemungkinan dibangunnya stasiun pemantauan bawah air pada beberapa area yang berada di ALKI II.

Strategi Pola operasi dan penggelaran kekuatan TNI AL di wilayah ALKI II.

Terkait dengan strategi, dalam mengatasi ancaman keamanan di wilayah laut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan oleh TNI AL di wilayah ALKI II adalah dengan kemampuan menguasai kepentingan negara di wilayah laut dan Kemampuan dalam kontrol terhadap wilayah laut, sehingga untuk mewujudkannya dapat di deskripsikan beberapa upaya sebagai berikut, pertama Pola Kemampuan menguasai kepentingan negara di wilayah laut yaitu Kemampuan yang dapat menjamin keamanan wilayah laut agar seluruh kekayaan alam yang terdapat di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga perlu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada pada hukum laut PBB (UNCLOS 82) sehingga mampu mengatasi Ancaman navigasi

yang dilakukan oleh kapal asing berupa berlayar berlalu-lalang di jalur ALKI II.

Kedua Kemampuan kekuatan TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan kerja sama dengan Angkatan Laut negara lain, diharapkan akan mampu mencegah dan menindak pelaku kejahatan transnasional yang dilakukan oleh pihak asing atau pihak di dalam negeri yang memiliki jaringan (link) dengan pihak asing. sehingga Ancaman kegiatan ilegal berupa *illegal Fishing, ilegal Logging, illegal Oil, illegal Mining* lewat laut, *illegal Entry, Sea Robbery, Smuggling, Human Trafficking* dapat teratasi.

Ketiga Kemampuan Alutsista yang memiliki jangkauan luas dalam mengamankan wilayah ALKI yang luas, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan Program pengadaan alutsista guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kegiatan operasi patroli pengamanan laut, diantaranya pengadaan kapal perang baik dari luar negeri ataupun pembangunan kapal perang di dalam negeri. Dalam program tersebut, untuk pengadaan alutsista tetap mengedepankan industri-industri pertahanan nasional, sedangkan untuk pengadaan alutsista dari luar negeri diupayakan disertai dengan program *transfer of technology* (ToT) guna membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri di masa depan. Hal ini dilakukan agar industri-industri pertahanan dalam negeri dapat menjadi salah satu kompetitor industri pertahanan pada tingkat internasional, sehingga mampu mengatasi terjadinya *Military Campaign* dari negara lain, maupun, pelanggaran melintasi perairan teritorial dengan cara menuntut hak lintas damai di laut di luar ALKI (Suhirwan et all, 2020).

Strategi selanjutnya adalah **Pola Kemampuan dalam kontrol terhadap wilayah laut yang dapat di implementasikan dengan cara pertama** Mengintegrasikan seluruh matra dan lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah laut Indonesia yang

mampu beraktivitas secara terintegrasi, sebagai bentuk *deterrence* atau penggentar. Gelar kekuatan TNI di wilayah ALKI II harus dirancang untuk mengatasi panjangnya jalur komando maupun dihadapkan pada *coverage area* dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam merespons berbagai bentuk ancaman secara cepat di daerah atau wilayah tanggung jawabnya (Arief et al, 2021).

Kedua Mengoptimalkan Patroli Keamanan Laut hingga pulau terluar di wilayah ALKI II. Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan ALKI II, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Namun demikian, "pameran bendera" atau show of flag seperti di atas tidak saja harus diartikan sebagai sebuah tindakan *coersive* tetapi merupakan sebuah *naval diplomacy* dan ketiga Membangun dan mengimplementasikan Sistem Komando dan Pengendalian (Siskodal) yang terintegrasi di antara ketiga matra yang beroperasi di wilayah ALKI II. Siskodal tersebut harus mengimplementasikan konsep *Network Centric Warfare* (NCW) yang mengintegrasikan seluruh sensor, sarana komunikasi dan teknologi informasi ke dalam suatu sistem sehingga para Panglima dapat mengambil keputusan secara efektif, seperti yang terlihat pada gambar berikut bahan cakupan wilayah pendeteksiannya harus mampu menjangkau seluruh wilayah penginderaan/*surveillance area* sampai dengan jarak jangkauan minimal 390 NM dan dapat mendukung semua Pangkalan di wilayah jalur ALKI II.

Kemudian terkait dengan Aspek diplomasi pertahanan yang diharapkan adalah sebagai berikut pertama Diplomasi Militer makin dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gelar kekuatan TNI di wilayah

ALKI II. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dipikirkan dalam optimalisasi peran militer diplomasi di Kawasan ALKI II, seperti penyamaan persepsi ancaman, bentuk kerja sama militer di wilayah ALKI II serta pelaksanaan diplomasi militer yang dilaksanakan TNI sebagai alat pencegahan konflik (*preventive diplomacy*). Dan kedua Penerapan diplomasi preventif yang mengarah pada pencegahan konflik harus dibangun dengan mengesampingkan sikap saling curiga atau dengan meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) khususnya dengan negara yang berbatasan dan dekat dengan ALKI II. Personel TNI yang duduk dalam delegasi perundingan mampu berperan sebagai diplomat dan cukup mahir memerankan dirinya dalam diplomasi Militer. Mampu memanfaatkan posisi tawar dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator bentuk Interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II dalam mendukung kedaulatan NKRI dapat disimpulkan bahwa Interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II belum terintegrasi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri. Kondisi dan kemampuan TNI AL saat ini dalam mengatasi pelanggaran di wilayah ALKI II sudah berjalan namun masih perlu peningkatan dari aspek kesiapan dan jumlah unsur yang digelar (Angkasa Dipua et al, 2021). Perlu peningkatan kemampuan pangkalan sekitar ALKI II dalam melaksanakan dukungan terhadap unsur operasi khususnya dukungan pemeliharaan dan ketersediaan BBM B-0, Interoperabilitas antar matra TNI di wilayah ALKI II saat ini sudah berjalan dengan baik, tetapi

belum mencapai tahap ideal dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah ALKI II. Masih adanya keterlambatan informasi diterima oleh masing-masing matra, dan masing-masing matra masih melaksanakan operasi sendiri-sendiri tanpa melibatkan matra lainnya, kemudian pada aspek aspek Piranti lunak yang dimiliki belum optimal dalam mengatur penyiapan gelar kekuatan TNI terpadu di wilayah ALKI II (Lukman Yudho Prakoso et all, 2021). Hal tersebut terlihat pada fakta bahwa Fungsi piranti lunak dalam pengamanan Wilayah ALKI II. Piranti lunak saat ini sudah dapat menunjang *stakeholder* terkait dalam pengamanan dan mengatasi pelanggaran di wilayah ALKI II, hanya saja diperlukan koordinasi yang terus menerus sehingga tercapainya sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan di sepanjang ALKI II dalam rangka menegakan hukum dan menegakan kedaulatan NKRI.

2. Berdasarkan upaya dalam Strategi Pola operasi dan penggelaran kekuatan TNI AL di wilayah ALKI II dapat disimpulkan bahwa Pola operasi dan penggelaran kekuatan tempur TNI belum optimal dengan masih bersifat gelar terpusat dan kewilayahan (Kasih Prihantoro et all, 2019). Hal tersebut terlihat pada penggelaran kekuatan tempur TNI di wilayah ALKI II saat ini terutama pada TNI AL dihadapkan pada Panjang jalur ALKI dan jumlah kapal yang melintas di ALKI II, permasalahan serta area patrol yang masih belum optimal di karenakan gelar kekuatan TNI AL yang beroperasi di wilayah tersebut masih sedikit dan belum terjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain dalam pengamanan di wilayah ALKI II, kemudian pada Kemampuan diplomasi TNI sebagai unsur pertahanan negara masih lemah. Untuk saat ini, diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI

lebih menitikberatkan pada peran TNI AL, dalam hal ini unsur-unsur dari Koarmada II untuk menghadapi persoalan-persoalan di wilayah ALKI II. Kemudian terkait dengan Kemampuan diplomasi TNI sebagai unsur pertahanan negara masih lemah. Untuk saat ini, diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI lebih menitikberatkan pada peran TNI AL, dalam hal ini unsur-unsur dari Koarmada II untuk menghadapi persoalan-persoalan di wilayah ALKI II. Hal ini tentunya terkait dengan peran diplomasi yang dimiliki oleh TNI AL. Peran TNI AU dapat dilihat dalam pelibatan unsur-unsur pesud TNI AU dalam operasi gabungan pengamanan ALKI II. Adapun TNI AD sebagai kekuatan kawan yang meliputi Kodam VI/MIW, Kodam IX/UDY, Kodam XIII/MDK dan Kodam XIV/HSN beserta jajarannya melaksanakan operasi imbang di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

3. Berdasarkan kesimpulan terhadap hasil penelitian Strategi gelar kekuatan TNI Angkatan Laut dalam mengatasi pelanggaran di wilayah ALKI II guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang, maka saran yang dapat peneliti ajukan upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain Presiden RI perlu memfasilitasi kementerian Pertahanan untuk pembangunan sistem satelit mandiri yang diproyeksikan khusus untuk mendukung sistem pertahanan negara. sebagaimana Teori *Sea Power* Alfred Thayer Mahan yang menjelaskan bahwa perlunya negara memiliki kemampuan dalam fungsi kontrol terhadap wilayah laut yang dimilikinya Artinya, Kemenhan dan TNI perlu membangun atau memiliki satelit yang berdiri sendiri sehingga tidak memanfaatkan satelit milik instansi lain

yang selama ini dilaksanakan, sehingga proses *Surveillance* dalam melacak pelanggaran di wilayah laut akan lebih maksimal. sehingga negara memiliki fleksibilitas dalam mengadakan kontrol terhadap wilayah laut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, R., Midhio, I. W., Risman, H., Anwar, S., Prakoso, L. Y., & Arief Midhio, I Wayan, Risman, Helda, Anwar, Syaiful, and Prakoso, Lukman Yudho, R. (2021). Makassar War in the Perspective of the Indonesian Total War. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(J. Soc. Polit. Sci.), 230–238.
- [2] Bartlet, H. C. (1995). *Naval War Collage Review; The Art of Strategy and Force Planning*, Newport. US Army Publishing
- [3] Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge Publisher.
- [4] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., Prakoso, L. Y., Brawijaya, U., & Pertahanan, U. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *Italienisch*, 11(2), 120–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.103>
- [5] Hart, L. H. (2001). *Strategy (2nd Edition)*. New York, NY: Frederick Praeger Publisher
- [6] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D. (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. *The 3th Indonesia International Defense Sciense Seminar*, 2(Universitas Pertahanan), 483–490.
- [7] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Budi Pramono, Rianto, A. I. S. (2021). *Bahan Ajar Sejarah Perang*. Unhan Press.
- [8] McNicholas, M. (2008). *Maritime Security an Introduction*. Oxford: Elsevier
- [9] Miles, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- [10] Moleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- [11] Suhirwan Adryan Ole, Cecep Kurniawan, L. Y. P. (2020). Indonesian Navy Against Covid-19. *Public Policy And Adminstration Research*, 10(IISTE), 18–23.
- [12] Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. New York: Blackswell Publisher.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN